

ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA DI YOGYAKARTA

Heny Hapsari

Alumni UPN "Veteran" Yogyakarta

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the General Allocation Fund and the Revenue simlutan and partially to the Shopping District and City in the province of Yogyakarta Special Region. This research is descriptive, to provide an overview of the state as clearly as possible to the object under study. Research conducted on four of the District Government and the Municipality in Yogyakarta. Appropriate object under study, budget and actual financial data obtained through the 2003-2008 fiscal year BPK portal. Data were analyzed with regression models. Research results showed that simultaneous General Allocation Fund and Revenue Expenditure significantly influence. Partially General Allocation Fund and Revenue Expenditure significantly influence.

Keywords: *General Allocation Fund, Local Revenue*

1. PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi Daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas Pemda, keselarasan hubungan antara Pusat dan Daerah serta Daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian Daerah (TAP MPR No. IV/MPR/2000). Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas maka sumber-sumber keuangan telah banyak bergeser ke Daerah. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan: (1) Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap mendasarkan batas kewajaran; dan (2) Didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dengan adanya peningkatan pelayanan publik di era desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi

investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius (pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal di satu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda.

Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 disebutkan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : (1) Hasil pajak daerah; (2) Hasil retribusi daerah; (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Namun di dalam perkembangan selanjutnya, di antara semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar, sehingga muncul anggapan

bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik dengan pajak dan retribusi daerah.

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum. DAU adalah dana hibah murni yang kewenangan penggunaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah penerima. UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan pengertian bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapat DAU dalam jumlah yang kecil. Pemberian DAU ini diharapkan benar-benar dapat mengurangi disparitas fiskal horizontal, daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relatif sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Daerah diharapkan mampu mengalokasikan sumber dana ini pada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong adanya peningkatan investasi di daerah dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kontribusi publik terhadap pajak (misal: membayar pajak atau retribusi) yang berimbas pada peningkatan PAD.

Sukriy dan Halim (2003) mengemukakan bahwa beberapa penelitian mengenai perilaku Pemerintah Daerah dalam merespon transfer Pemerintah Pusat yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa respon Pemda berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya sendiri. Ketika respon Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer dibanding pendapatan daerahnya sendiri maka disebut *flypaper effect*.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban PEMDA (Pemerintah Daerah) yang diakui sebagai

pengurangan nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Mulyana, Subhan dan Slamet, 2006). Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan menentukan besarnya Belanja daerah, yaitu penjumlahan antara jumlah DAU yang diterima daerah dengan jumlah Kapasitas daerah. Struktur belanja daerah yang digunakan untuk APBD tahun anggaran 2006 masih mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Kepmendagri (Keputusan Menteri Dalam Negeri) No. 29 Tahun 2002. Akan tetapi, struktur belanja daerah untuk APBD tahun anggaran 2007, sudah harus mengacu kepada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan SAP belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi kelompok belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Masing-masing kelompok belanja tersebut dirinci menurut jenisnya. Belanja daerah menurut jenisnya disusun sesuai dengan kebutuhan satuan kerja perangkat daerah.

Belanja daerah menurut kelompoknya terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Menurut jenis belanjanya, ada tujuh jenis belanja tidak langsung: (1) Belanja Bunga; (2) Belanja Subsidi; (3) Belanja Hibah; (4) Bantuan sosial; (5) Belanja Bagi Hasil; (6) Bantuan Keuangan; dan (7) Belanja Tidak Terduga.

Belanja langsung adalah kelompok belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh ada atau tidak adanya program atau kegiatan. Menurut jenis belanja, ada 3 jenis kelompok belanja langsung: (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang dan Jasa; dan (3) Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pemebelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah.

Flypaper Effect

Di Indonesia, seperti ditegaskan dalam UU No. 25/1999, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK, selain bagi hasil. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan horizontal antar daerah, mengurangikesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah dan untuk menctakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah.

Bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya merupakan pertanyaan penelitian yang menarik sejaklaman. Peneliti terdahulu menggunakan berbagai pendekatan untuk menjelaskan perilaku Pemda dalam mengalokasikan dana yang dimilikinya, baik dana yang bersumber dari transfer pemerintah di atasnya ataupun dari pendapatannya sendiri. Pemda bisa merespon transfer dari Pempus secara simetris dan tidak simetris (Gamkhar & Oates, 1996). Beberapa peneliti menemukan bahwa respon Pemda berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak). Artinya, ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulus atas belanja yang ditimbulkan berbeda dengan stimulus yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut *flypaper effect*.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Mulyana, Subhan dan Slamet, 2006). Dana alokasi umum (DAU) merupakan instrument transfer ke daerah yang berperan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan kemampuan keuangan antar daerah (*equalization grant*), dan dialokasikan dalam bentuk *block grant*. Berkaitan dengan itu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, indikator yang digunakan dalam perhitungan dalam menentukan besarnya DAU yang diterima oleh daerah, yaitu selisih antara kebutuhan daerah dengan kapasitas daerah.

Sebagian studi menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja, sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan. Sementara studi tentang pengaruh transfer atau *grants* dari Pemerintah Pusat terhadap keputusan pengeluaran atau belanja Pemda sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Prakoso, 2004). Dengan pemberian DAU terhadap pemerintah daerah diharapkan pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi

tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja daerah maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Abimanyu, 2005).

Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

Manajemen pemerintahan di Indonesia memasuki era baru seiring diberlakukannya desentralisasi fiskal. Kebijakan yang terkait dengan UU no.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU no. 25 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah efektif diberlakukan per Januari 2001. Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Dengan adanya peningkatan pelayanan publik di era desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat berwujud apabila ada upaya serius (pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. DAU bersama dengan PAD merupakan sumber dana daerah yang digunakan untuk mendanai Belanja Daerah dan PAD merupakan tolak ukur kemandirian daerah. Penelitian Diah Ayu dan Arief (2007) tentang pengaruh antara DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah, menyatakan bahwa DAU memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada pengaruh PAD

terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut berarti Belanja Daerah lebih dominan didanai oleh transfer pemerintahan pusat ketimbang pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Hal tersebut mencerminkan ketergantungan yang kuat antara pemerintah pusat.

Hasil penelitian Diah Ayu Kusumadewi dan Arief Rahman (2007) dan Kesit Bambang Prakoso (2004) menemukan bahwa besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut menggambarkan terjadinya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal serupa diungkapkan oleh Kuncoro (2007) dalam penelitiannya yang berjudul "Fenomena *Flypaper Effect* pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia" yang menyatakan bahwa peningkatan alokasi transfer diikuti dengan penggalan PAD yang lebih tinggi. Selanjutnya peningkatan alokasi transfer juga diikuti dengan pertumbuhan belanja yang lebih tinggi. Hasil penelitian Hartati (2007) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan terjadinya *Flypaper Effect* antara Kabupaten/Kota yang PADnya tinggi dengan Kabupaten/Kota yang PADnya rendah dan juga berdampak pada menurunnya kinerja keuangan daerah. Penelitian-penelitian tersebut belum pernah dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perberbedaan lainnya dilihat dari data objek yang diteliti menggunakan data penelitian dari tahun 2003-2008.

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara silmutan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan (3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan pendahuluan, maka hipotesis yang diajukan adalah: (1) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

berpengaruh secara Silmutan terhadap Belanja Daerah (BD); (2) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara Parsial terhadap Belanja Daerah (BD); dan (3) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD) lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo dan 1 Kotamadya yaitu Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2003-2008.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data diperoleh melalui akses internet (download) dari portal Badan Pemeriksa Keuangan (www.bpk.go.id) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Mulyana, Subhan dan Slamet, 2006). Dana Alokasi Umum merupakan dana hibah murni yang diberikan Pemerintah Pusat yang kewenangannya secara penuh di berikan kepada pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, indikator yang digunakan dalam perhitungan menentukan besarnya DAU yang diterima oleh daerah, yaitu

selisih antara Kebutuhan daerah dengan Kapasitas daerah. Besarnya DAU ditentukan oleh suatu formula khusus, yaitu:

| | |
|---|--|
| a. DAU untuk Provinsi | $\text{Jumlah DAU untuk propinsi} \times \frac{\text{Bobot Propinsi yang bersangkutan}}{\text{Jumlah bobot seluruh propinsi}}$ |
| b. DAU untuk daerah Kabupaten/Kota | $\text{Jumlah DAU untuk Kabupaten/Kota} \times \frac{\text{Bobot Kabupaten/kota yang bersangkutan}}{\text{Jumlah bobot seluruh Kabupaten/kota}}$ |
| Dimana Formula untuk menghitung Bobot DAU daerah adalah | |
| | $\text{Bobot DAU daerah} = \frac{\text{Kebutuhan DAU Daerah}}{\text{Total Kebutuhan DAU seluruh Daerah}}$ |

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mulyana, Subhan dan Slamet, 2006). Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 disebutkan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan menentukan besarnya Kapasitas daerah, yaitu selisih antara Belanja daerah dengan Jumlah DAU yang diterima oleh daerah (Diah Ayu dan Arief, 2007). Pajak daerah terdiri dari pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

1. Pajak Provinsi, jenis-jenis dan tarif pajak provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5%.
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 10%.
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%.
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20%.

2. Pajak Kabupaten/Kota, jenis-jenis dan tarif pajak daerah terdiri dari:
 - b. Pajak hotel sebesar 10%.
 - c. Pajak restoran sebesar 10%.
 - d. Pajak hiburan sebesar 35%.
 - e. Pajak reklame sebesar 25%.
 - f. Pajak penerangan jalan sebesar 10%.
 - g. Pajak parkir sebesar 20%..

Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban PEMDA (Pemerintah Daerah) yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi antara lain belanja operasi, belanja modal dan belanja lain-lain tak terduga (Mulyana, Subhan dan Slamet, 2006). Indikator yang digunakan dalam perhitungan menentukan besarnya Belanja daerah, yaitu penjumlahan antara jumlah DAU yang diterima daerah dengan jumlah kapasitas yang dimiliki daerah (Diah Ayu dan Arief, 2007).

Metode Analisis Data

Alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda (*multiple regression*) dengan menggunakan Software SPSS. Analisis regresi ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh DAU dan PAD secara silmutan maupun parsial terhadap Belanja Daerah. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut (Sekaran, 2003) :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{DAU} + \beta_2 \text{PAD} + e$$

dimana :

- Y = Belanja Daerah (BD)
- α = Konstanta
- β = Slope atau koefisien regresi
- PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)
- e = error term

Model regresi yang digunakan akan benar-benar menggunakan hubungan yang signifikan dan representative atau dikenal dengan BLUE (*bert liner unbiased estimator*) maka model tersebut

harus memiliki asumsi dasar klasik. Asumsi dasar tersebut adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala *multikolinearitas*, *heteroskedastisitas* dan *autokorelasi* diantara variabel-variabel bebas tersebut.

Pengujian Hipotesis, untuk menguji bisa atau tidak model regresi tersebut digunakan dan untuk menguji kebenaran hipotesis yang dilakukan, maka diperlukan pengujian statistik, antara lain : (1) **Uji Secara Silmutan (Uji F)**, bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian signifikan ini menggunakan uji F, yaitu membandingkan antara signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. $H_a \neq 0$, artinya ada pengaruh secara silmutan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD). Maka pengambilan keputusannya adalah:

- a. H_a diterima apabila F signifikan < 0,05
- b. H_o ditolak apabila F signifikansi > 0.05

Pengujian secara Parsial (Uji t-Statistik)

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial ini digunakan uji-t. $H_a \neq 0$, artinya ada pengaruh secara parsial antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah (BD). Maka pengambilan keputusannya adalah

- a. H_a diterima apabila t signifikansi < 0,05
- b. H_o diterima apabila t signifikansi > 0,05

Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. (Ghozali (2005). Nilai koefisien determinasi antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *Adjusted R Square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

3. HASIL PENELITIAN

Hasil analisis yang diperoleh secara rinci disertai dengan langkah-langkah analisis data yang dilakukan. Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode tahun 2003-2008. Data yang diolah dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini digunakan alat analisis yang sesuai. Dalam penelitian ini alat

analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Statistik Deskriptif

Berikut akan dijelaskan statistik deskriptif dengan menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen Belanja Daerah, sedangkan variabel independen adalah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah untuk periode tahun 2003-2008. Untuk lebih jelasnya masing-masing berdasarkan tahun ditunjukkan rata-rata, median, tinggi dan rendah dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Hasil Deskriptif Statististik (000 rupiah)

| | DAU | PAD | BD |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Tahun 2003</u> | | | |
| Rata-rata | 162.274.593 | 93.847.119 | 397.917.196 |
| Median | 196.100.000 | 45.470.000 | 411.602.596 |
| Tertinggi | 292.700.000 | 304.780.000 | 497.884.301 |
| Terendah | 18.254.232 | 17.481.692 | 320.996.065 |
| Jumlah sampel | 5 | 5 | 5 |
| <u>Tahun 2004</u> | | | |
| Rata-rata | 253.786.000 | 44.147.780 | 382.651.408 |
| Median | 255.642.000 | 30.777.820 | 370.340.576 |
| Tertinggi | 307.331.000 | 79.911.419 | 488.077.550 |
| Terendah | 197.787.000 | 19.715.648 | 311.299.867 |
| Jumlah sampel | 5 | 5 | 5 |
| <u>Tahun 2005</u> | | | |
| Rata-rata | 265.447.800 | 177.335.769 | 446.997.040 |
| Median | 268.325.000 | 37.683.848 | 479.585.515 |
| Tertinggi | 318.139.000 | 711.278.644 | 561.861.134 |
| Terendah | 201.231.000 | 24.187.455 | 324.915.691 |
| Jumlah sampel | 5 | 5 | 5 |
| <u>Tahun 2006</u> | | | |
| Rata-rata | 409.995.800 | 58.413.965 | 602.016.696 |
| Median | 432.868.000 | 44.005.311 | 596.006.208 |
| Tertinggi | 485.397.000 | 96.419.456 | 724.739.983 |
| Terendah | 316.832.000 | 29.801.036 | 495.705.564 |
| Jumlah sampel | 5 | 5 | 5 |
| <u>Tahun 2007</u> | | | |
| Rata-rata | 454.079.226 | 71.949.150 | 613.322.338 |
| Median | 459.851.000 | 57.229.727 | 575.683.751 |
| Tertinggi | 543.065.000 | 120.656.549 | 752.113.976 |

| | DAU | PAD | BD |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| Terendah | 365.042.000 | 28.878.356 | 492.840.107 |
| Jumlah sampel | 5 | 5 | 5 |
| Tahun 2008 | | | |
| Rata-rata | 499.014.728 | 229.769.275 | 792.994.224 |
| Median | 504.395.748 | 69.800.762 | 717.302.227 |
| Tertinggi | 592.594.528 | 592.594.528 | 1.045.423.303 |
| Terendah | 403.656.783 | 32.907.615 | 597.059.934 |
| Jumlah sampel | 5 | 5 | 5 |

Tabel 3.1 Menunjukkan dari data DAU dalam kurun waktu 2003-2008 menunjukkan bahwa ukuran penyebaran data untuk DAU adalah homogen karena lebih kecil dari pada nilai rata-ratanya.

Uji Asumsi Klasik

Agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak bias, dilakukan pengujian uji Normalitas, Multikolinieritas, uji Autokorelasi dan uji Heteroskedastisitas. Hasil Uji normalitas atas data penelitian dalam model regresi adalah berdistribusi normal. Dalam **Uji Multikolinearitas** diukur berdasarkan tingkat variance inflation factor (VIF) dan nilai tolerance, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. **Uji Autokorelasi** menunjukkan, bahwa berdasarkan hasil olah regresi diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,843 yang berada diantara 1,66 sampai 2,34 yaitu berada pada daerah tidak ada autokorelasi, sehingga disimpulkan bahwa model

regresi ini tidak terjadi Autokorelasi. Hasil **Uji Heterokedastisitas**, Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan kepengamatan yang lain menurut Santoso (2004). Dilihat dalam grafik, diketahui bahwa titik yang terbentuk menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian model yang diajukan dalam penelitian ini terbebas dari gejala Heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Untuk melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah terhadap variabel dependen Belanja Daerah. Hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Hasil Regresi

| Variabel | Koef. Regresi | t-hitung | p-value |
|-----------------------------|---------------|----------|---------|
| (Constant) | 1.700.000.000 | | |
| Dana Alokasi Umum (X1) | 0,985 | 8,490 | 0,000 |
| Pendapatan Asli Daerah (X2) | 0,270 | 2,749 | 0,011 |
| Adjusted R Square | 0,747 | | |
| F statistic | 43,779 | | |
| p-value | 0,000 | | |

Sumber : Data regresi, 2010

Berdasarkan Tabel 4.6 maka hasil persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 $Y = \alpha + \beta_1 \text{DAU} + \beta_2 \text{PAD} + e$

Belanja Daerah =
 $1.700.000.000 + 0,985 \text{ DAU} + 0,270 \text{ PAD} + e$

dimana :

- Y = Belanja Daerah (BD)
- α = Konstanta
- β = Slope atau koefisien regresi
- PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)
- e = error

Hasil regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : (1) Nilai konstanta sebesar 1.700.000.000 menunjukkan besarnya Belanja Daerah sama dengan 1.700.000.000 jika nilai DAU

dan PAD sama dengan nol; (2) Nilai koefisien regresi DAU sebesar 0,985 artinya jika DAU berubah satu satuan sedangkan nilai PAD konstan maka perubahan nilai Belanja Daerah sebesar 0,985; dan (3) Nilai koefisien regresi PAD sebesar 0,270 artinya jika PAD berubah satu satuan sedangkan nilai DAU konstan maka perubahan nilai Belanja Daerah sebesar 0,270.

Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara silmutan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Uji Signifikansi secara Silmutan (Uji F). Berdasarkan hasil pengolahan data dengan software SPSS 17,0 for windows maka hasil pengujian dengan koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah seperti pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3 Uji Signifikansi Silmutan

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .874 ^a | .764 | .747 | 88955769.7 | 1.843 |

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: BD

Berdasarkan hasil uji *Adjusted R Square* pada tabel 4.7 di atas pada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,747. Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel independen yaitu

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen yaitu : Belanja Daerah (BD) sebesar 74,7% dan sisanya 25.3% dijelaskan faktor lain diluar penelitian.

Tabel 3.4

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 6.93E+17 | 2 | 3.464E+17 | 43.779 | .000 ^a |
| | Residual | 2.14E+17 | 27 | 7.913E+15 | | |
| | Total | 9.07E+17 | 29 | | | |

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: BD

Dari Tabel 3.8 diatas pada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) diperoleh F-hitung sebesar 43,779 dengan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil temuan diatas maka hipotesis pertama (H1) yang menyatakan "Dana Alokasi Umum (DAU)

dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah" **didukung**.

Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Secara Parsial terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Uji signifikansi secara Parsial (Uji t). Adalah pengujian hipotesis dilakukan secara individual dari kedua variabel independen, yaitu: Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah terhadap variabel dependen Belanja Daerah dengan pengujian secara parsial.

Tabel 3.5. Uji signifikansi parsial

| | | Coefficients ^a | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|--|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | | |
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF | |
| 1 | (Constant) | 1.7E+08 | 4.3E+07 | | 4.046 | .000 | | | |
| | DAU | .985 | .116 | .801 | 8.490 | .000 | .982 | 1.019 | |
| | PAD | .270 | .098 | .259 | 2.749 | .011 | .982 | 1.019 | |

^a. Dependent Variable: BD

Variabel DAU memiliki koefisien positif sebesar 0,985 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, berarti DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Peningkatan 1 satuan pada DAU akan meningkatkan BD sebesar 0,985 dengan asumsi PAD konstan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu dan Bambang Prakoso (2003) yang menyatakan bahwa DAU mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Hal ini disebabkan karena tujuan pemberian DAU diharapkan untuk dapat mengurangi disparitas fiskal horizontal, daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relatif sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Selain itu DAU merupakan hibah murni dari pemerintah pusat yang kewenangan penggunaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah penerima.

Variabel PAD memiliki koefisien positif sebesar 0,270 dengan signifikansi sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05 artinya PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini membuktikan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap transfer dari pemerintah Pusat.

Analisis *flypaper effect* selama kurun 2003-2008

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan uji signifikansi parsial atau uji t. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi t hitung yang dihasilkan oleh masing-masing variabel independen dalam persamaan regresi dengan signifikasinya (α) yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesa diatas yaitu jika nilai signifikansi t hitung $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak.

Tabel 3.6 Uji signifikansi parsial

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | 2.899E8 | 6.373E7 | | 4.549 | .000 | | |
| DAUt-1 | .784 | .185 | .605 | 4.238 | .000 | 1.000 | 1.000 |
| PADt-1 | .512 | .171 | .427 | 2.989 | .007 | 1.000 | 1.000 |

a. Dependent variabel: BD_t

Dari hasil analisa diketahui nilai koefisien $(DAU)_{t-1}$ sebesar 0,784 dengan signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai koefisien $(PAD)_{t-1}$ sebesar 0,512 dengan signifikansi sebesar 0,007. Dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum $(DAU)_{t-1}$ memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Atau dengan kata lain DAU yang diterima daerah pada tahun anggaran sebelumnya juga mampu mempengaruhi Belanja Daerah tahun berikutnya. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah $(PAD)_{t-1}$ memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Atau dengan kata lain PAD yang diterima Pemerintah daerah tahun anggaran sebelumnya mampu mempengaruhi daerah untuk melakukan belanja pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk mengetahui terjadinya *flypaper effect* pada kurun waktu 2003-2008 $(DAU)_{t-1}$ harus memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada $(PAD)_{t-1}$. Untuk itu, signifikansi untuk tiap variabel harus dibandingkan. Signifikansi yang lebih kecil berarti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependennya. Dari hasil regresi di Tabel 4.9 diketahui bahwa nilai signifikansi untuk $(DAU)_{t-1}$ lebih kecil daripada signifikansi untuk $(PAD)_{t-1}$ ($0,000 < 0,007$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terjadi *flypaper effect* dalam kurun waktu 2003-2008 bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa $(DAU)_{t-1}$ memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap Belanja Daerah daripada $(PAD)_{t-1}$ **didukung**.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah;
- (2) Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah;
- (3) Dari pengujian ini juga dapat disimpulkan bahwa DAU_{t-1} terhadap Belanja daerah tahun berjalan lebih kuat daripada pengaruh PAD_{t-1} terhadap Belanja daerah. Hal ini berarti Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah mampu mempengaruhi Belanja Daerah dan dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan belanja daerah tahun berjalan lebih ditentukan oleh DAU yang telah diterima pada periode sebelumnya daripada PAD yang juga diperoleh pada periode sebelumnya. Hal ini juga membuktikan bahwa *flypaper effect* juga terjadi dalam respon Pemda terhadap DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} .

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang harus diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Keterbatasan berada pada jumlah sampel penelitian dari 5 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diteliti hanya 6 tahun

yaitu 2003-2008, hal ini karena keterbatasan data. Variabel yang diteliti hanya menggunakan 2 variabel yang mempengaruhi Belanja Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sehingga tidak dapat mendeteksi komponen-komponen lain yang dapat mempengaruhi Belanja Daerah.

Saran

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi manajemen keuangan pemerintah daerah dalam mengatur nilai Belanja Daerah dengan kebijakan-kebijakannya dalam era desentralisasi fiskal dalam upaya kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.
- 2) Untuk penelitian berikutnya agar memasukkan aspek perilaku pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah, serta memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartati. 2007. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah serta dampaknya terhadap Kinerja Keuangan pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. JAAI Vol. 6 No. 2.
- Kuncoro, Haryo. 2007. *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Di Indonesia*. Symposium Nasional Akuntansi X. Makasar
- Kusumadewi dan Rahman. 2007. *Flypaper Effect pada DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Di Indonesia*. JAAI Vol. 11 No. 1, JUNI 2007:67-80.
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mulyana, Budi Subhan dan Kuwat Slamet. 2006. *Keuangan Daerah (perspektif desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD Di Indonesia cetakan Pertama*. Editor Tim LPKPAP.
- PP No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY)*. JAAI Vol. 8 No. 2.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research methods for business : A Skill-Building Approach*, Fouth Edition, New York: John Wiley & Sons.
- Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis Cetakan, Bandung: CV Alfabeta*.
- Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang *Pemerintah Pusat*.
- Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- <http://www.bpk.go.id>
- <http://www.bppk.depkeu.go.id/indeks.php/keuangan-daerah/view-category.html>